

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

Jl. Radin Inten II No.3 Duren Sawit

Jakarta Timur- DKI Jakarta 13440

Telp. 86902303 Fax. 86902304

e-mail : keuangan.ptajakarta2013@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Radin Inten II No.3 Duren Sawit

Jakarta Timur - DKI Jakarta 13440

Telp. 86902303 Fax. 86902304

e-mail : keuangan.ptajakarta2013@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

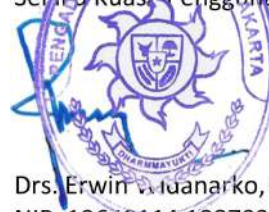
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juli 2020
Sekretaris
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Erwin Sumanarko, S.H., S.A.P, M.Pd.
NIP. 19640114 198703 1 003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran dan Daftar	62

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Jl. Radin Inten II No.3 Duren Sawit Jakarta Timur - DKI Jakarta 13440

Telp. 86902303 Fax. 86902304 e-mail : keuangan.ptajakarta2013@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juli 2020
Sekretaris
Sebagai Kepala Pengguna Anggaran



Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P, M.Pd.
NIP. 19640114 198703 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.10.865.789,- atau mencapai 64,40 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp.16.873.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp.13.119.504.062,- atau mencapai 43,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.30.461.032.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2020. Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.24.195.863.953,-, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.88.206.245,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.24.107.657.708,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.60.000.000,- dan Rp. 24.135.863.953,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.10.065.789,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.12.994.987.769,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(12.984.921.980),-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan

Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.666.790,- dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp.12.984.255.190,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp.24.011.480.870,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp.12.984.255.190,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,-. Dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.13.108.638.273,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp.24.135.863.953,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2020			30 JUNI 2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	16.873.000	10.865.789	64,40	12.502.596
JUMLAH PENDAPATAN		16.873.000	10.865.789	-	12.502.596
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3	26.276.419.000	11.059.400.440	42,09	11.420.322.486
Belanja Barang	B.4	3.957.613.000	1.883.103.622	47,58	807.673.551
Belanja Modal	B.5	227.000.000	177.000.000	77,97	129.995.300
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		30.461.032.000	13.119.504.062	43,07	12.357.991.337

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NERACA

PER 30 Juni 2020 DAN 2019

(dalam satuan Rupiah)

Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.4	-	-
<i>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (neto)</i>	C.5	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	32.651.245	28.136.461
Persediaan yang Belum Diregister		(4.445.000)	(4.075.300)
Jumlah Aset Lancar		88.206.245	104.061.161
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan TP/TGR (neto)	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASE TETAP			
Tanah	C.14	20.367.671.000	21.710.894.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.750.226.376	4.447.325.776
Gedung dan Bangunan	C.16	3.485.802.000	2.646.375.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	49.563.000	49.563.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	20.865.646	20.865.646
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.566.470.314)	(4.248.945.509)
Jumlah Aset Tetap		24.107.657.708	24.626.077.913

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	34.075.000	34.075.000
Aset Lain-lain	C.22	3.502.880	440.101.526
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(37.577.880)	(474.176.526)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		24.107.657.708	24.730.139.074
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	60.000.000	80.000.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		60.000.000	80.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN		60.000.000	80.000.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	24.135.863.953	24.650.139.074
JUMLAH EKUITAS		24.135.863.953	24.650.139.074
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.195.863.953	24.730.139.074

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

LAPORAN OPERASIONAL PER 30 Juni 2020 DAN 2019

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	10.065.789	12.212.227
JUMLAH PENDAPATAN		10.065.789	12.212.227
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.003.803.020	11.385.744.486
Beban Persediaan	D.3	62.862.485	60.650.170
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.429.913.453	492.619.248
Beban Pemeliharaan	D.5	327.065.619	212.529.379
Beban Perjalanan Dinas	D.6	26.854.400	22.236.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	144.488.792	123.508.730
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		12.994.987.769	12.297.288.013
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12.984.921.980)	(12.285.075.786)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.187.415	1.702.980
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		520.625	297.790
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		666.790	1.405.190
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(12.984.255.190)	(12.283.670.596)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	24.011.480.870	24.588.320.929
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12.984.255.190)	(12.283.670.596)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	13.108.638.273	12.345.488.741
EKUITAS AKHIR	E.5	24.135.863.953	24.650.139.074

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung” yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Megupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Peningkatan kualitas hakim.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	16.873.000	16.873.000
Jumlah Pendapatan	16.873.000	16.873.000
BELANJA		
Belanja Pegawai	26.276.419.000	26.276.419.000
Belanja Barang	3.957.613.000	3.957.613.000
Belanja Modal	227.000.000	227.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
JUMLAH BELANJA	30.461.032.000	30.461.032.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan:
Rp.10.865.789,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.10.865.789,- atau mencapai 64,40 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.16.873.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2019 (dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.873.000	10.065.789	59,66
2	Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
4	Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	800.000	-
	Total Pendapatan	16.873.000	10.865.789	64,40

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar 13 persen
Dibandingkan TA 2019.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Perubahan	
				Rp	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.065.789	11.762.596	(1.696.807)	(14,43)
2	Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara	-	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-	-
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	-	-	-	-
5	Pendapatan dari Pemindahtangan BMN	-	-	-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	800.000	740.000	60.000	8,11
Total Pendapatan		10.865.789	12.502.596	(1.636.807)	(13,09)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara :
Rp.13.119.504.062
,-

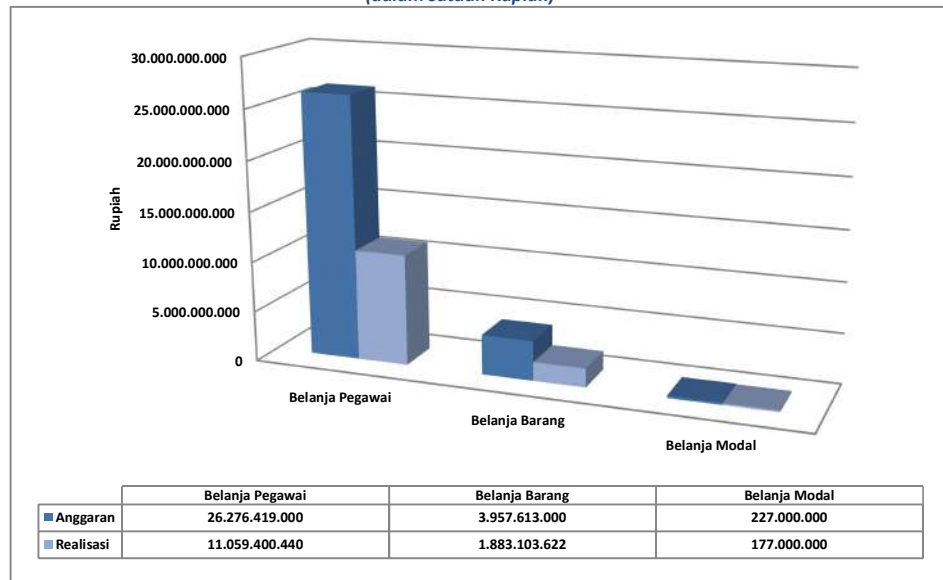
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.13.119.504.062,- atau sebesar 43,07 persen dari anggaran senilai Rp.30.461.032.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	26.276.419.000	11.059.400.440	42,09
Belanja Barang	3.957.613.000	1.883.103.622	47,58
Belanja Modal	227.000.000	177.000.000	77,97
Total Belanja Bruto	30.461.032.000	13.119.504.062	43,07
Pengembalian Belanja	-	1.320.032	0
Total Belanja Netto	30.461.032.000	13.118.184.030	43,07

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,16 % dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena anggaran tahun 2020 lebih besar daripada anggaran pada tahun 2019.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	11.059.400.440	11.420.322.486	(360.922.046)	-3,16
Belanja Barang	1.883.103.622	807.673.551	1.075.430.071	133,15
Belanja Modal	177.000.000	129.995.300	47.004.700	36,16
Total Belanja	13.119.504.062	12.357.991.337	761.512.725	6,16

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp.11.060.720.472

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per 30 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp.11.059.400.440,- dan Rp. 11.420.322.486,-.

Realisasi belanja pegawai TA 2020 mengalami penurunan (3,16) % dibandingkan TA 2019. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.110.276.300	2.252.492.900	(142.216.600)	-6,31
Belanja bulat Gaji PNS	19.079	29.091	(10.012)	-34,42
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	179.890.990	200.211.250	(20.320.260)	-10,15
Belanja Tunj. Anak PNS	29.457.226	36.091.764	(6.634.538)	-18,38
Belanja Tunj. Struk PNS	44.910.000	49.385.000	(4.475.000)	-9,06
Belanja Tunj. Fungsi PNS	7.061.690.000	7.163.060.000	(101.370.000)	-1,42
Belanja Tunj. PPh PNS	1.276.571.057	1.392.452.021	(115.880.964)	-8,32
Belanja Tunj. Beras PNS	73.940.820	77.851.500	(3.910.680)	-5,02
Belanja Uang Makan PNS	276.265.000	238.853.000	37.412.000	15,66
Belanja Tunj. Umum PNS	7.700.000	10.680.000	(2.980.000)	-27,90
Belanja Uang Lembur	-	-	-	0,00
Total Belanja Brutto	11.060.720.472	11.421.106.526	(360.386.054)	-3,16
Pengembalian Belanja	1.320.032	784.040	535.992	68
Total Belanja Netto	11.059.400.440	11.420.322.486	(360.922.046)	-3,16

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp1.883.103.622,-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per 30 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp.1.883.103.622,- dan Rp. 807.673.551,-. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami Peningkatan 133,15 % dibandingkan TA 2019. Hal ini dikarenakan anggaran tahun 2020 mengalami kenaikan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	608.210.810	380.364.335	227.846.475	59,90
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	#DIV/0
Belanja Barang Persediaan	76.324.500	60.283.900	16.040.600	26,61
Belanja Jasa	848.135.913	134.418.261	713.717.652	530,97
Belanja Pemeliharaan	323.577.999	210.371.055	113.206.944	53,81
Belanja Perjalanan Dinas	26.854.400	22.236.000	4.618.400	20,77
Total Belanja Brutto	1.883.103.622	807.673.551	1.075.430.071	133,15

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal
:Rp.177.000.000,-

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per 30 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp.177.000.000,- dan Rp. 129.995.300,-. Realisasi belanja modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 36.16 % dibandingkan TA 2019. Hal ini dikarenakan anggaran belanja modal tahun 2020 lebih besar daripada tahun 2019.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	177.000.000	129.995.300	47.004.700	36,16
Total Belanja Brutto	177.000.000	129.995.300	47.004.700	36,16
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Total Belanja Netto	177.000.000	129.995.300	47.004.700	36,16

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp.60.000.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.60.000.000,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum di pertanggung jawabkan atau belum di setorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000.000	0
	Jumlah	60.000.000	0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan : Rp. 0

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun yang disiapkan untuk menampung suatu peristiwa dimana pada Satuan Kerja masih terdapat kas dari hasil penerimaan PNBP yang pada tanggal akhir periode belum sempat disetor ke rekening Kas Umum Negara.

C.3. Kas Lainnya Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas: Rp. 0

Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2020	31 Desember TA 2019
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
2	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
	Jumlah	0	0

C.4. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

*Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan Ganti
Rugi: Rp.0,-*

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2020

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1.	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
	Jumlah	0	0

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	0

*Bagian Lancar
Tagihan TGR:
Rp.0,-*

C.5. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan TP/TGR (Netto) per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

C.6. Piutang Bukan Pajak

*Piutang bukan
Pajak :
Rp.0*

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0,-. Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-
Piutang Bukan
Pajak : Rp.0,-*

Saldo Penyisihan Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. , sedangkan per 30 Juni 2020 tercatat sebesar Rp.0,-. Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
(dalam satuan Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai
1.		Lancar	-	-	-
Total					

C.8. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2020 dan 2019

Jenis	2020	2019
Pembayaran Sewa Rumah Dinas	-	0
JUMLAH	-	0

C.9. Pendapatan yang Masih Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Diterima pada DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

C.10. Persediaan

Persediaan:
Rp.32.651.245,-

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.32.651.245,- dan Rp. 18.365.060,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau, untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah melakukan Opname Fisik barang Persediaan dengan Berita Acara Stock Opname Nomor : W9-A/1082/PL.03/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 dengan kondisi Baik. Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

No	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	29.724.990	16.376.515
2	Amunisi	-	-
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	2.926.255	1.988.545
4	Suku Cadang	-	-
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	-	-
7	Barang dalam Proses	-	-
JUMLAH		32.651.245	18.365.060

*Piutang
Tagihan
TP/TGR Rp.0,-*

C.11. Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara.

*Tagihan
TP/TGR Rp.0,-*

C.12. Tagihan TP/TGR (Netto)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan TP/TGR (Netto) per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp.0,-*

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah:
Rp.20.367.671.00
0,-*

C.14. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.20.367.671.000,- dan Rp. 20.367.671.000,-

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	732 M2	124	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	5.151.927.000
2.	2	598 M2	598	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	15.215.744.000
Jumlah						20.367.671.000

Tanah bangunan rumah Negara Golongan I dengan luas 1.309 M2 terdiri dari :

- Luas 732 M2 di jalan H. Sinen Pasar Minggu, Ragunan, Jakarta Selatan di peruntukan untuk Rumah Dinas Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan senilai Rp. 5.151.927.000,-
- Luas 577 M2 di Jalan Swakarsa 5 Duren Sawit Pondok Kelapa Jakarta Timur di Peruntukan untuk rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan senilai Rp.15.215.744.000,-

C.15. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin :*
Rp.4.750.226.376
,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.4.750.226.376,- dan Rp. 4.573.226.376,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	4.573.226.376
Mutasi Tambah	
Penambahan Saldo Awal	0
Pembelian	177.000.000
Transfer Masuk	
Mutasi Kurang	
Penghapusan	0
Saldo per 30 Juni 2020	4.750.226.376
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	(4.291.955.791)
Nilai Buku 30 Juni 2020	458.270.585

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Pembelian PC untuk Panitera Pengganti senilai Rp.177.000.000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.16. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan :*
Rp.3.485.802.000
,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.3.485.802.000,- dan Rp. 3.485.802.000,-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	3.485.802.000
Mutasi Tambah	
Revaluasi BMN	-
Mutasi Kurang	
Revaluasi BMN	-
Saldo per 30 Juni 2020	3.485.802.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	(261.504.235)
Nilai Buku 30 Juni 2020	3.224.297.765

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.17. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan :
Rp.49.563.000,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.49.563.000,- dan Rp.49.563.000,-

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	49.563.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2020	49.563.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	- 13.010.288
Nilai Buku 30 Juni 2020	36.552.712

Rincian asset tetap Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.18. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp.20.865.646,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.20.865.646 dan Rp.20.865.646,-

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	20.865.646
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2020	20.865.646
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	-
Nilai Buku 30 Juni 2020	20.865.646

Nilai dan perhitungan asset tetap lainnya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap :
Rp.(4.566.470.314
),-*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.(4.566.470.314),- dan Rp.(4.421.981.522),- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.750.226.376	4.291.955.791	458.270.585
2	Gedung dan Bangunan	3.485.802.000	261.504.235	3.224.297.765
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	49.563.000	13.010.288	36.552.712
4	Aset Tetap Lainnya	20.865.646	-	20.865.646
	Jumlah	8.306.457.022	4.566.470.314	3.739.986.708

C.21 Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud :
Rp.34.075.000,-

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.34.075.000,- dan Rp.34.075.000,- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berupa Software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan Adapun rincian ATB per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	34.075.000
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 30 Juni 2020	34.075.000
Akumulasi Penyusutan s/d 30 Juni 2020	34.075.000
Nilai Buku per 30 Juni 2020	-

Rincian Aset tak Berwujud (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Aplikasi Perkara	5.500.000
2.	Aplikasi TV Media	3.575.000
3.	Aplikasi Statistik Kepegawaian	12.500.000
4.	Aplikasi Statistik Perkara	12.500.000
Jumlah Total		34.075.000

C.22 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp.3.502.880,-

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.3.502.880,- dan Rp. 3.502.880,-. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2019	3.502.880
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	0
Penambahan Saldo Awal	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi Kurang	
Penghapusan	0
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	
Saldo per 30 Juni 2020	3.502.880
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	(3.502.880)
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya:
Rp.(37.577.880),-*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah Rp.(37.577.880),- dan Rp.(37.577.880),- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	3.502.880	(3.502.880)	-
Software	34.075.000	(34.075.000)	-
JUMLAH	37.577.880	(37.577.880)	-

C.24 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp.60.000.000,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.60.000.000,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

**Utang kepada Pihak
Ketiga:**
Rp.0,-

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.82.030.690,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	-	0	-
Jumlah		0	

C.26 Pendapatan diterima di Muka

**Pendapatan Diterima
di Muka:**
Rp.0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

**Beban yang Masih
Harus Dibayar:**
Rp.0,-

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2020 dan TA 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019
Belanja yang Masih harus Dibayar	0	0
JUMLAH	0	0

C.28 Ekuitas

Ekuitas:
Rp.24.650.139.074,-

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.24.650.139.074,- dan Rp. 24.588.320.929,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp :*
Rp.10.065.789,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.10.065.789,- dan Rp.12.212.227,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.873.000	10.065.789	59,66
2	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tayl	-	800.000	-
Total Pendapatan		16.873.000	10.865.789	64,40

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp.11.003.803.020,-

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.11.003.803.020,- dan Rp. 11.385.744.486,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.109.318.300	2.252.452.800	(143.134.500)	(6,35)
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.975	25.151	(6.176)	(24,56)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	179.795.190	200.211.250	(20.416.060)	(10,20)
Beban Tunj. Anak PNS	29.457.226	36.091.764	(6.634.538)	(18,38)
Beban Tunj. Struktural PNS	44.910.000	49.385.000	(4.475.000)	(9,06)
Beban Tunj. Fungsional PNS	7.052.890.000	7.161.580.000	(108.690.000)	(1,52)
Beban Tunj. PPh PNS	1.271.104.541	1.392.452.021	(121.347.480)	(8,71)
Beban Tunj. Beras PNS	73.940.820	77.851.500	(3.910.680)	(5,02)
Beban Uang Makan PNS	235.988.000	205.755.000	30.233.000	14,69
Beban Tunjangan Umum PNS	7.700.000	9.940.000	(2.240.000)	(22,54)
Total Beban Pegawai	11.005.123.052	11.385.744.486	(380.621.434)	(3,34)

D.3. Beban Persediaan

**Beban
Persediaan :**
Rp.62.862.485,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.62.862.485,- dan Rp.60.650.170,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	62.862.485	60.650.170	2.212.315	3,65
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	3.487.620	3.027.684	459.936	15,19
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-	-
Beban Persediaan Pita, Cukai, Materai & Lege:	-	-	-	-
Total Beban Persediaan	66.350.105	63.677.854	2.672.251	4,20

D.4. Beban Barang dan Jasa

**Beban Barang
dan Jasa :**
Rp.1.429.913.453,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.429.913.453,- dan Rp.492.619.248,-. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30

Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	497.510.560	261.337.000	236.173.560	90,37
Beban Pengiriman Surat Dinas	1.197.000	615.700	581.300	94,41
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	34.550.000	30.850.000	3.700.000	11,99
Beban Barang Operasional Lainnya	73.325.750	86.571.635	(13.245.885)	100,00
Beban Bahan	-	-	-	-
Beban Langganan Listrik	84.099.359	98.128.525	(14.029.166)	(14,30)
Beban Langganan Telepon	9.075.021	9.556.864	(481.843)	(5,04)
Beban Langganan Air	4.865.443	5.559.524	(694.081)	(12,48)
Beban Sewa	725.290.320	-	725.290.320	-
Total Beban Jasa	#####	492.619.248	937.294.205	190,27

D.5. Beban Pemeliharaan

**Beban
Pemeliharaan:
Rp.327.065.619**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.327.065.619,- dan Rp.212.529.379,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	123.604.900	22.419.640	101.185.260	451,32
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	33.423.500	22.000.000	11.423.500	51,93
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166.549.599	165.082.055	1.467.544	0,89
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-	-
Total Beban Pemeliharaan	323.577.999	209.501.695	114.076.304	54,45

D.6. Beban Perjalanan Dinas

**Beban
Perjalanan
Dinas :**
Rp.26.854.400,-

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.26.854.400,- dan Rp.22.236.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	7.080.000	13.236.000	(6.156.000)	(46,51)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	7.230.000	9.000.000	(1.770.000)	(19,67)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	130.000	-	-	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	12.414.400	-	-	
Total Beban Perjalanan Dinas	26.854.400	22.236.000	(7.926.000)	(35,64)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

**Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :**
Rp.0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni 2020 dan 2019**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk	-	-	-	-
Total Beban Barang untuk	-	-	-	-

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0,-

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-
Total Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.144.488.792,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.144.488.792,- dan Rp.123.508.730,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	100.285.215	89.667.677	10.617.538	11,84
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.584.039	33.221.515	10.362.524	31,19
Beban Penyusutan Jaringan	619.538	619.538	-	-
Jumlah Penyusutan	144.488.792	123.508.730	20.980.062	16,99
Beban Amortisasi Software	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset lain-lain	-	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-	-
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	144.488.792	123.508.730	20.980.062	16,99

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih :
Rp.(0),-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertahiran piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.(0),- dan Rp.(0),-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	-	-	-

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp.0,-*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2020 dan 2019**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extra Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Beban Aset Extra Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Beban Aset Extra Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Total Beban Lain-lain	-	-	-	-

D.12. Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.520.625,-

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2020 dan 2019**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.187.415	1.702.980	(515.565)	(30)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	520.625	297.790	222.835	100
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	666.790	1.405.190	(292.730)	(21)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0,-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni 2020 dan 2019**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	-	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-	-
Total Pos Luar Biasa	-	-	-	-

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.24.011.480.870,- dan Rp.24.588.320.929,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.(12.984.255.190),- dan Rp.(12.283.670.596),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yakni pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap laba rugi perusahaan sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan yang diterapkan perusahaan.

E.3.1 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang

diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- Dan Rp.0,- Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-.

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.13.108.638.273,- dan Rp.12.345.488.741,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
Per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagikan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	-
Jumlah	-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp.0,- sedangkan DKEL sebesar Rp.0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0,-, lalu karena ada Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.0,- sehingga Nilai Transfer Masuk sebesar Rp.0,- terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Ditjen Badilag	-
2	Bahan Perpustakaan Tercetak	Ditjen Badilag	-
JUMLAH			-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 , sebesar Rp.0,- dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2020 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, adalah Rp.0,-. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak menerima Hibah

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.24.135.863.953,- dan Rp.24.650.139.074,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan oleh BPK pada tahun 2019

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Terlampir

F.2.3. Rekening Pemerintah

Daftar Rekening Pemerintah yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yaitu :

- a. BRI Unit Pulogadung Jakarta a/c 0930-01-000015-30-3 a.n. BPG175.PTA JAKARTA (401112) digunakan sebagai Penampung uang APBN untuk DIPA BUA dengan saldo per 30 Juni 2020 sebesar Rp.6.084.000,-
- b. BRI Unit Pulogadung Jakarta a/c 0930-01-000022-30-0 a.n. BPG175.PTA JAKARTA (401113) digunakan sebagai Penampung Uang APBN untuk DIPA BADILAG dengan saldo per 30 Juni 2020 sebesar Rp.0,-
- c. BRI Unit Pulogadung Jakarta a/c 0930-01-000017-30-5 a.n. RPL 175 PTA Jakarta Utk PDT Biaya Perkara digunakan sebagai Pendaftaran Biaya Perkara dengan saldo per 30 Juni 2020 sebesar Rp.1.800.000,-

F.2.4. Revisi DIPA

Mengenai DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terdapat revisi anggaran yaitu merevisi POK pada output yang mengalami kekurangan/kelebihan anggaran yaitu:

1. Revisi DIPA 1 meliputi :

Pada Program Layanan Dukungan Manajemen satker kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran terdapat penambahan anggaran Sewa mesin fotocopy yang semula Rp.363.000.000 menjadi Rp.528.000.000,-

2. Revisi DIPA 2 meliputi :

Pada Program Pembinaan /Sosialisasi Tingkat Banding ke Tingkat Pertama terdapat pengurangan Anggaran dari Badan Urusan Administrasi (BA.BUN) yang semula Rp.207.910.000,- menjadi 129.178.000,-

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat koreksi data SPM/SP2D , SSBP dan SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya
